

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Gunawan Setiardja. 1990, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta
- Abdul Manan, *Hukum Islam Dari Berbagai Wacana*, Pustaka Bangsa Jakarta
- Ani Sri Rahayu. 2017, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Malang
- Arie Hutagalung. 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Raja Grafindo, Jakarta
- Arie Sukanti Hutagalung dan Markus Gunawan. 2008, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Radjawali Press, Jakarta
- Bagir Manan dalam W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono. 2009, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta
- Bahder Johan Nasution. 2016, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono. 1999, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta
- Budiman NPD. 2005, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta
- Edie Toet Hendratno. 2009, *Negara Kesatuan, Desentralisasi, Dan Federalisme*, Graha Ilmu. Yogyakarta
- Elza Syarief. 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Endriatmo Soetarto. 2017, *Laut Dan Masyarakat Hukum Adat*, Jakarta
- Faisal Basri. 2002, *Perekonomian Indonesia Tantangan Dan Harapan Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Kalisari
- Hendra Karianga. 2017, *Carut-marut pengelolaan keuangan daerah di era Otonomi Daerah: perspektif hukum dan politik*, Kencana, Jakarta

- Hilman Hadikusuma. 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung
- HR. Ridwan. 2013, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Husni Jalil. 2006, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan RI Berdasarkan UUD 1945*, CV. Utomo, Bandung
- Indrohato. 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Irawan Soejito. 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Irwan Soejito. 1990, *Hubungan Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta
- Irfan Fachruddin. 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Jimly Asshiddiqie. 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Joeniarto, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Alumni, Bandung, 1982
- Johny Ibrahim. 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Publishing
- Joko Widodo. 2001, *Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*, Insan Cendekia, Surabaya
- Kamal Hidjaz. 2010, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makassar
- Lili Rasjidi dan Ira Tahanian. 2004, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Maria SW Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta

- Miriam Budiardjo. 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Moch. Munir. 1997, *Pemakaian Pengadilan Negeri sebagai Lembaga Untuk Menyelesaikan Sengketa Dalam Masyarakat*, Universitas Airlangga, Surabaya
- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah. 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar
- Moh. Koesnoe. 1979, *Catatan-Catatan Terhadap Hukum Adat Dewasa Ini*, Airlangga University Press, Surabaya
- Moh. Kusnadi dan Bintan R Saragih. 1989, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Gramedia, Jakarta
- Muhaimin. 2015, *Metode Penelitian Hukum*, UPT. Mataram University Press, Mataram.
- Nur Hasanah Ismai. 2000, *Otonomi Bidang Pertanahan: Reposisi Peranan Pusat dan Daerah, dan ideologi Politik pertahanan*, Makalah, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
- Nurnaningsih Amriani. 2011, *Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa. Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Otje Salman Soemadiningrat. 2002, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, Alumni, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki. 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Philipus M Hadjon. 2005, *Pengantar Hukum Administrasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon , *Fungsi Normatif Hukum Administrasi Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Airlangga,
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya
- Prajudi Atmosudirdjo. 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013

- Purbacaraka, Purnadi dan Ridwan Halim. 1993, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Ghalia Indonesia
- Ridwan HR. 2002, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rusadi Kantaprawira. 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Rusmadi Murad. 1991, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Mandar Maju, Bandung
- S.F. Marbun. 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Sadjijono. 2007, *Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Sarjono Soekanto. 1990, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta
- Sedarmayanti. 2003, *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung
- Sinyo Harry Sarundajang. 1999, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Soedikno Mertokusumo. 2002, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Soerojo Wignjodipoero, dalam Aminuddin Salle. 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*. Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Widya Karta, Semarang
- Suriansyah Murhani. 2009, *Kewenangan Pemerintah Dalam Mengurus Bidang Pertanahan*, Laksbang Justitia, Surabaya
- Suwoto Mulyosudarmo. 1990, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan*, Universitas Airlangga, Surabaya
- Theo Huijbers. 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta
- Winahyu Erwiningsih, *Hak Menguasai Negara Atas Tanah*, Cet. 1, Penerbit Total Media, Yogyakarta, 2009

B. Jurnal

- Ardiansyah. 2019, *Peran Pemerintah Daerah di Bidang Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia*, Jurnal de Jure Volume 11 Nomor I
- Ateng Syafrudin. 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung
- Budi Harsono. 2006, *46 Tahun UUPA, Usaha Penyempurnaan yang Belum Selesai*, Makalah pada Pertemuan Tahunan Memperingati Hari Ulang Tahun UUPA, Jakarta
- Dewi Tuti Muryati dan B. Rini Heryanti. 2011, *Pengaturan dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Non-litigasi di Bidang Perdagangan*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, Vol. 13 No. 1
- Elita Rahmi. 2009, *Tarik Menarik Antara Desentralisasi dan Sentralisasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Urusan Pertanahan*, Jurnal Hukum, Vol. 16, Fakultas Hukum Universitas Jambi
- Hayatul Ismi, 2012, *Pengakuan dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional*, Jurnal Ilmu Hukum 3 no. 1
- Ilyas dkk. 2015, *Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah* dalam Jurnal Ilmu Hukum No.65 April
- Indrohato. 1994, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Lubis, A. F. 2021, *Kedudukan hukum dari hak ulayat dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan pertahanan negara di Provinsi Papua Barat*. Jurnal Esensi Hukum, 3(2)
- Marjono Reksodiputro. 2011, *Hukum Agraria 1960 dan Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Desain Hukum Vol. 11 No. 3
- May Linda Iswaningsih, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Lokal Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Omnibus Law Cipta Kerja*, Jurnal Preferensi Hukum 2, no. 3

- Ratnah Rahman. 2017, *Konflik Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat)*, Sosioreligius Volume III No. 1 Juni
- Sadu Wasistiono. 2005, *Esensi UU 32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Makalah disampaikan pada Rakernas Asosiasi DPRD Kota-Se-Indonesia, Batam
- Sinaga, Pidari. 2020, “*Konflik dan Reformasi Agraria di Indonesia: Tantangan dan Harapan.*” *Journal of Government*, Vol. 5, No. 2
- Solihat, Yeyet, 2012, *Hukum Agraria Nasional* , Majalah Ilmiah Solusi Unsika ISSN 1412-86676 Vol. 10 No. 22
- Sunarno. 2006, *Praktek ADR (Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan) dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah*, Jurnal Media Hukum, Vol. 13, No. 1. Yogyakarta, FH UMY
- Supriyadi Supriyadi. 2023, *Application of the Adat Principles Barenti ko Syara', Syara' Barenti ko Kitabullah in Sumbawa Regency*, *International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM)*
- Supriyanto. 2008, *Implementasi Kebijakan Pertanahan*. Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8 No 3
- Urip Santoso. 2011, *Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Bidang Pertanahan*, Jurnal ADIL Vol. 3 No. 2, Fakultas Hukum Universitas Airlangga

C. Website

- Dokumen Kebijakan UNDP. 2000, *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan. Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia*.
- Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2015
- <https://www.tempo.co/lingkungan/aman-mencatat-perampasan-2-8-juta-hektare-wilayah-adat-selama-2024--1183726> diakses pada 27 Februari 2025
- <https://kbbi.web.id/>. diakses tanggal 12 Januari 2025.
- <https://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/mingwan-seminar-ruu-masyarakat-adat> diakses 12 Januari 2025

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Dokumen Kebijakan UNDP. 2000, *Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia Berkelanjutan. Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia.*

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia, *Undang-Undang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta